

Usulan PPPK Pemprov Banten Didominasi Guru

SERANG (IM) - Pemprov Banten mengusulkan 11.737 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Pemerintah Pusat. Usulan PPPK Pemprov itu didominasi oleh tenaga guru.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Nana Supiana, mengatakan bahwa usulan PPPK Pemprov Banten sebanyak 11.737 orang itu terdiri dari tenaga guru 6.873 orang.

"Tenaga teknis 4.585 orang dan tenaga kesehatan 279 orang," ujar Nana, Selasa (19/3).

Ia menegaskan, sebanyak 11.737 orang itu merupakan usulan Pemprov Banten.

Saat ini, Pemprov masih menunggu kuota formasi dari Pemerintah Pusat.

Kata Nana, seluruh pegawai non ASN diperbolehkan mengikuti seleksi apabila formasi sudah ada.

Bagi yang lulus akan diterima sebagai PPPK. Sementara bagi yang tidak lulus, wacananya akan dibatalkan PPPK paruh waktu.

Namun, terkait PPPK paruh waktu itu masih menunggu regulasinya.

Apabila PPPK paruh waktu diberlakukan, maka seluruh pegawai non ASN atau honorier di Pemprov Banten dapat ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu. ● pra

Banjir Tenggelamkan Alun-alun Demak, Terparah sejak 32 Tahun Terakhir

DEMAK (IM) - Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kian parah, pada Selasa (19/3). Saat ini Alun-alun Kabupaten Demak tenggelam oleh banjir.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 12.00 WIB, banjir sudah mencapai Alun-alun dengan ketinggian selutut orang dewasa.

Sementara di ruas jalan raya sekitar Alun-alun Demak arus mengalir deras. Sementara genangan air terdalam mencapai 60 sentimeter.

Warga setempat, Nurul Azizah (35) mengatakan, kawasan Alun-alun Demak mulai banjir sejak hari ini.

"50 sentimeter mungkin, tapi baru ini kemarin tidak. Makin tinggi airnya," ujarnya di Alun-alun Demak, Selasa.

Menurutnya, ia sengaja datang menerjang banjir untuk menunaikan shalat di Masjid Agung Demak.

"Mau sholat ke masjid, kalau ibadah kesusahannya. Tapi kalau Masjid Agung masih bisa ya aman," ungkapnya.

Nurul menambahkan, kondisi Demak kota juga sempat mengalami banjir serupa ketika dia umur 3 tahun. "Terakhir saya kecil sih, tapi Demak. Belum sekolah orang tiga tahun 92 atau berapa gitu," katanya.

Warga lain, Agus Priyono (46) mengatakan, air masuk ke Alun-alun Demak sejak dua hari terakhir. "Jalan lebih dalam, ini dua harian (air datang)," ujarnya.

Dalam ingatan Agus, banjir terakhir sampai Alun-alun Demak terjadi pada tahun 1992. Sejak saat itu baru tahun 2024 ini. "Banjir bandang dulu antara 92 atau 93 itu, tapi tidak separah ini. Ini lebih parah kan menyeluruh di kota," beber dia.

Kondisi ini, membuat warga setempat turut prihatin lantaran aktivitas terganggu, terlebih bulan Ramadhan. "Ikut prihatin, akses utama dan saran olahraga ikut terganggu. Masjid dulu ramai sekarang sepi," ungkapnya. ● pra

BPOM PERIKSA MAKANAN DI PASAR LAMA KOTA SERANG

Sejumlah petugas Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) Banten memeriksa sampel makanan dari pedagang di Pasar Lama Kota Serang, Banten, Selasa (19/3). Pemeriksaan makanan dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya seperti borax, formalin, pewarna tekstil dan zat-zat terlarang lainnya.



Legislator Lebak Minta Jabatan OPD Diisi Sesuai dengan Kompetensi

Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah, cukup prihatin dengan banyaknya kepala OPD dijabat bukan orang ahli di bidangnya, seperti Kepala Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo dan lainnya.

RANGKASBITUNG (IM) - Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Musa Weliansyah meminta kepala daerah mulai dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten hingga Pj Bupati/Wali Kota mengutamakan penempatan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kompetensi.

"Kami mengutip hadits bahwa jika jabatan itu dipegang bukan orang ahli di bidangnya maka tunggu kehancurannya," katanya di Rangkasbitung, Banten, Selasa (19/3).

Dalam otonomi daerah ini, lanjutnya, penempatan jabatan kepala OPD ditentukan berdasarkan keputusan kepala daerah setempat. Karena itu ia mengingatkan agar penempatan jabatan di OPD sesuai bidang keahlian.

Pihaknya cukup prihatin banyak kepala OPD dijabat bukan orang ahli di bidangnya, seperti Kepala Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas

Sosial, Dinas Kominfo dan lainnya, dijabat bukan oleh orang ahli di bidangnya.

"Itu permasalahan jika dijabat bukan orang yang tidak memiliki kompetensi keilmuan bisa menimbulkan kerusakan dan kehancuran," kata Musa.

Penempatan jabatan sesuai dengan keilmuan, menurutnya, akan membuat kinerja lebih optimal dan memiliki inovasi-inovasi pemikiran untuk kemajuan bidang yang ditugaskan.

Bahkan, kata dia, mereka akan mampu mempresentasikan keilmuan tersebut di hadapan atasannya, masyarakat, pakar, pengamat, hingga para jurnalis.

Karena itu ia minta Pj Gubernur Banten hingga Pj Bupati/Wali Kota agar penempatan jabatan pada kepala OPD pada orang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

"Sebab, jabatan jika dipegang oleh orang ahli tentu hasilnya lebih baik, karena

mereka mampu melakukan manajemen dengan baik," katanya.

"Kami meyakini bangsa ini akan maju dan sejahtera jika jabatan dipegang oleh

orang ahli yang memiliki kompetensi keilmuan," kata Musa. ● pra

Dinkes Sosialisasikan RME ke 149 Klinik di Kab. Tangerang

TANGERANG (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi Rekam Medik Elektronik (RME) dan Satu Sehat ke 149 klinik yang ada di Kabupaten Tangerang.

Kepala Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang, dr. Ari Hardiyanto menjelaskan, bahwa Rekam Medik Elektronik (RME) merupakan sistem yang digunakan untuk merekam, menyimpan, dan mengelola informasi medis pasien secara elektronik yang terkoneksi dengan Satu Sehat.

"Jadi pada RME ini mencakup riwayat kesehatan pasien, diagnosis, perawatan yang diberikan, resep obat, hasil tes laboratorium dan informasi

lainnya yang berkaitan dengan perawatan kesehatan pasien," katanya, Selasa (1/3).

Menurutnya, penggunaan RME menggantikan catatan medis tradisional yang menggunakan kertas dengan sistem yang dapat diakses secara elektronik.

Hal tersebut dilakukan agar akses untuk melihat rekam medis pasien lebih mudah, perawatan yang lebih terkoordinasi, dan analisis data yang lebih efektif.

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2024 ini mengharuskan semua fasilitas kesehatan wajib menggunakan RME yang sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Hal ini disebutkan dalam Permenkes Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2024,

guna membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan," ungkapnya.

Sebagai informasi, seluruh Puskesmas di Kabupaten Tangerang sudah terlebih dahulu menggunakan RME yang terkoneksi dengan Satu Sehat dibandingkan dengan klinik.

Maka dengan begitu Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi kepada 149 klinik berdasarkan belum adanya penggunaan RME di berbagai klinik se-Kabupaten Tangerang.

"Kami berharap agar seluruh klinik yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang dapat segera menerapkan RME yang telah disosialisasikan," katanya. ● pp

BI Banten Siapkan Uang Pecahan Rp4,57 Triliun untuk Lebaran

SERANG (IM) - Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten menyediakan uang tunai pecahan kecil senilai Rp4,57 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kepala Perwakilan (KPW) BI Provinsi Banten, Ameriza M Moesa di Serang, Banten, Selasa (19/3), mengatakan jumlah uang tunai untuk kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri di 2024 tersebut mengalami kenaikan 21 persen dibandingkan tahun 2023.

"Tahun ini terjadi peningkatan permintaan uang pecahan di masyarakat Banten, kami telah menyiapkan sebanyak Rp4,57 triliun atau meningkat 21 persen dibandingkan tahun lalu yang Rp3,69 triliun," katanya.

Menurutnya, hal itu

menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih baik di masyarakat dibandingkan tahun lalu. Selain itu, pihaknya juga memastikan pecahan uang yang disediakan dalam kondisi layak edar.

"Kami akan memberikan layanan di seluruh wilayah Banten tepatnya di 12 titik, kami juga telah menyiapkan kuota penukaran uang untuk 6.000 orang," katanya.

Selain itu, ia menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan perbankan di antaranya Bank Woori Sahabat, Bank Mandiri, BNI, BTN, bjb, bjb Syariah dan BCA, yang akan melaksanakan penukaran uang di loket bank, yang berjumlah sebanyak 199 titik penukaran uang.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan penukaran uang

bisa melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu di website <https://pintar.bi.go.id>.

"Masyarakat yang ingin melakukan penukaran bisa langsung masuk ke website terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan tempat dan waktu yang diinginkan," katanya.

Adapun jadwal penukaran uang di Provinsi Banten adalah Alun-alun Kota Serang pada 19 Maret, Pasar Panimbang, Kabupaten Pandeglang dan Alun-alun Cilegon 20 Maret, Pasar Cibaliung 21 Maret, halaman Bank BTN Tangerang City 26 Maret, Alun-alun Rangkasbitung 1 April, Alun-alun Cilegon dan Alun-alun Pandeglang 2 April, halaman Masjid KP3B 3 April, Rest Area Km 43 Tol Jakarta-Merak dan Pelabuhan Merak 4 April, serta Alun-alun Serang 5 April. ● pra

TANGANI KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK

Dinkopukmperindag Kota Serang Usulkan Pendirian BUMD

SERANG (IM) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkopukmperindag) Kota Serang meminta agar adanya pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menangani permasalahan kenaikan harga komoditas.

Pendirian BUMD tersebut nantinya untuk mengatur sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kepala Dinkopukmperindag Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, harga kebutuhan pokok di Kota Serang setiap memasuki momen-momen tertentu, seperti bulan Ramadhan, selalu mengalami kenaikan.

"Kalau di daerah luar mungkin harga tetap stabil di momen seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadhan harga masih terbilang stabil bahkan cenderung turun. Kalau di kita, mungkin ada sirkulasi formula yang belum kita temukan hingga saat ini," ujar Wahyu, Selasa (19/3).

Wahyu mengaku, pihaknya memiliki berbagai langkah yang akan dilakukan.

Salah satunya adalah

pendirian BUMD yang bertujuan untuk mengatur kebutuhan pokok masyarakat.

"Ada beberapa langkah yang harus kami lakukan itu yaitu pembentukan BUMD sebagai terminalnya barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.

Namun, kata Wahyu, apabila BUMD tersebut belum bisa didirikan, terdapat cara lain untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Serang.

"Kalau belum ada BUMD, kita bisa melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama ini seperti daerah produsen di tempat lain bisa mengirimkan distributor ke daerah kita di sini (Kota Serang) jadi sifatnya bisnis to bisnis," katanya.

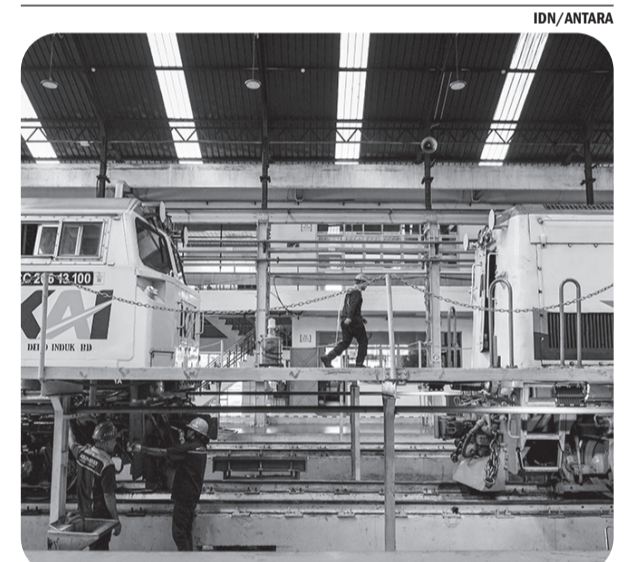
Wahyu menjelaskan, kerja sama antar Pemerintah Daerah itu dibarengi dengan kebijakan yang harus dilakukan.

Seperti memberikan subsidi transportasi pengiriman ke Kota Serang. "Tapi tetap ada peran Pemerintah di situ, ongkos distribusinya itu kita berikan subsidi. Karena kita tidak bisa berbicara jangka pendek masalah kenaikan harga barang ini," jelasnya. ● pra



PRODUKSI MADU DARI LEBAH TRIGONA DI KOTA BOGOR

Sejumlah pekerja memproduksi madu herbal dalam kemasan botol di CV Nutrima Sehatalami, Kelurahan Sindangbarang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/3). Produksi madu dari lebah Trigona maupun madu herbal tersebut mengalami peningkatan saat bulan Ramadhan dari sebelumnya 8 ribu menjadi 10 ribu botol per hari untuk memenuhi pesanan baik secara daring maupun melalui marketplace ke sejumlah daerah di Indonesia.



PENAMBAHAN ARMADA KERETA UNTUK MUDIK LEBARAN

Pekerja melakukan perawatan lokomotif di Depo Lokomotif Daop 2, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/3). PT KAI Daop 2 Bandung menyiapkan enam kereta api tambahan untuk melayani masa angkutan Lebaran tahun 2024 yang akan dioperasikan untuk periode keberangkatan 31 Maret sampai 21 April 2024.

Alokasi Dana Desa Belum Cair, Ribuan Kades di Banten Merana

SERANG (IM) - Ribuan Kepala Desa (Kades) di Banten saat ini tengah merana menatap nasib mereka yang terpaksa harus mengambil utang atas nama pribadi demi membiayai operasional desa mereka.

Hal itu dilakukan karena Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tiga bulan terakhir ini belum juga cair.

"Betul, ADD dari bulan Januari belum juga cair. Operasional desa jadi terhambat," ujar Sekretaris Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Banten, Rafik Rahmat Taufik, Selasa (19/3).

Rafik mengatakan, saat ini pihaknya tidak mempunyai sumber anggaran apapun untuk menunjang operasional di desa. Bahkan, untuk membayar listrik, jaringan internet hingga alat tulis kantor (ATK), kepala desa harus utang.

"Hal anu paling sederhana, bayar internet, listrik dan ATK, ngahutang (Hal yang paling sederhana,

bayar internet, listrik dan ATK, ngutang)," ujar Rafik dalam bahasa Sunda.

Ia mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan ADD itu hingga kini belum cair, di antaranya, kebijakan di Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun Pemerintah Pusat.

"Bisa dari Pemda yang menunda-nunda, atau bisa karena uang dari Pusat belum masuk ke kas daerah," ungkapnya.

Walaupun begitu, pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Bayah Timur ini tetap memastikan pelayanan masyarakat di desa tetap akan berjalan seperti biasa.

"Pelayanan tetap kita upayakan secara maksimal," tegasnya.

Meski demikian, ia berharap jika ADD itu dapat segera cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024.

Sementara, Kabid Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi Banten, Superman, mengatakan, kebijakan tentang ADD berada di kabupaten dan kota.

"Ranahnya itu ada di kabupaten dan kota," pungkasnya. ● pra